

# jurnal Bu Rosmery p.m.koreksi VI

*by* Basuki Rachmat

---

**Submission date:** 18-Jan-2022 03:41PM (UTC+0700)

**Submission ID:** 1743427729

**File name:** JURNAL\_P.M.\_BU\_ROSMERY\_KOREKSI\_VI.docx (40.16K)

**Word count:** 4663

**Character count:** 30254

## KEBIJAKAN PEMERINTAH BAGI PERLINDUNGAN DAN KESELAMATAN MASYARAKAT TERHADAP DAMPAK PANDEMI COVID 19 DI INDONESIA

Rosmeri Elsyé

Institut Pemerintahan Dalam Negeri  
rosmerie6@gmail.com

### Abstrak

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran seberapa jauh, kebijakan pemerintah bagi perlindungan dan keselamatan masyarakat terhadap dampak pandemic covid 19, yang saat ini sedang mewabah di Indonesia. Penularan covid 19 di Indonesia, sudah selama hampir 10 bulan telah menulari sebahagian masyarakat di Indonesia,

Angka penularan terkonfirmasi sampai dengan awal bulan Februari 2021, telah mencapai angka diatas 1 juta positif masyarakat terkonfirmasi positif, dan yang meninggal dunia sudah mencapai diatas 30.000 jiwa, serta yang sembuh sudah mencapai diatas angka 900.000 jiwa. Alahat semakin banyaknya yang terkonfirmasi positif, akibat semakin banyak masyarakat yang tertular, maka berdampak kepada ketersediaan ruang-ruang isolasi, yang saat ini sudah memasuki ambang batas sesuai standar WHO dengan banyaknya masyarakat yang terkonfirmasi positif, dan meninggal dunia, berakibat akan kesediaan lahan pemakaman yang saat ini semakin terbatas. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah menggunakan metode kualitatif, dan analisis diskriptif, dengan data diperoleh dari media cetak, media elektronik dan literatur-literatur lain yang terkait dengan kebijakan pemerintah dalam penanganan covid 19. Kesimpulannya Berbagai kebijakan telah ditempuh oleh pemerintah, diantaranya kebijakan dengan menerbitkan dan menetapkan Perpu 1 tahun 2020, tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Negara (menghadapi Covid 19) di Indonesia, dengan kebijakan ini melakukan bantuan-bantuan sosial bagi masyarakat terdampak covid 19. Dan pemberian bantuan bagi UMKM yang terdampak covid 19, serta insentif PPh 21 bagi pengusaha terdampak, dan pemberian bantuan kepada masyarakat yang bergaji dibawah 5 juta setiap bulannya.

**Kata Kunci:** Kebijakan, Perlindungan, Keselamatan Masyarakat, Pandemi covid 19.

**GOVERNMENT POLICY FOR COMMUNITY PROTECTION AND SAFETY  
ON THE IMPACT OF THE COVID-19 PANDEMIC IN INDONESIA**

Rosmeri Elsyé

Institute of Home Affairs [rosmerie8@gmail.com](mailto:rosmerie8@gmail.com)

**Abstract**

This research was conducted with the aim of getting an overview of the government's policies for the protection and safety of the public against the impact of the COVID-19 pandemic, which is currently endemic in Indonesia. The transmission of covid 19 in Indonesia, for almost 10 months, has infected some people in Indonesia. The number of confirmed transmissions until the beginning of February 2021, has reached over 1 million positive people are confirmed positive, and those who have died have reached more than 30,000 people, and those who have recovered have reached over 900,000 people. As a result of the increasing number of positive confirmed cases, due to more and more people being infected, it has an impact on the availability of isolation rooms, which have now entered the threshold according to WHO standards with many people who have been confirmed positive, and died, resulting in the readiness of burial grounds, which is currently limited. The method used in this writing is using qualitative methods, and descriptive analysis, with data obtained from print media, electronic media and other literature related to government policies in handling covid 19. In conclusion, various policies have been adopted by the government, including policies by issuing and stipulates Perpu 1 of 2020, concerning State Financial Policy and Stability of the State Financial System (facing Covid 19) in Indonesia, Used for handling covid 19, namely by providing aid stimuli to affected MSMEs, affected communities, as well as providing income tax incentives Article 21 for affected entrepreneurs. Salary subsidies for people who have an income of less than 5 million per month.

**Keywords:** Policy, Protection, Public Safety, Covid 19 Pandemic.

## PENDAHULUAN

**A**danya musibah kesehatan secara massif, yang melanda dunia akhir akhir ini telah berdampak kepada sosial budaya masyarakat, perekonomian masyarakat, bertambahnya masyarakat yang menganggur tidak memiliki pekerjaan dan bertambahnya masyarakat miskin di Dunia, termasuk di Indonesia. Pemerintah

Indonesia untuk menanggulangi masalah tersebut khususnya masalah perlindungan dan keselamatan masyarakat, telah melakukan berbagai kebijakan, dari kebijakan terkait dengan pendanaan untuk mengatasi masalah penyebaran covid 19, kebijakan pembangunan infrastruktur kesehatan,

dalam arti membangun rumah-rumah sakit baru dipulau galang, dan menggunakan fasilitas wisma atlet bekas Asian games di Kemayoran dan Pademangan Jakarta Utara, untuk dijadikan rumah sakit rujukan bagi penanganan pasien yang terinfeksi virus corona, dan meningkatkan dan memberdayakan rumah-rumah sakit yang ada saat ini, untuk dijadikan rumah sakit untuk menampung pasien covid 19.

Kondisi ini sudah barang tentu membutuhkan energy yang tidak sedikit dan sangat melelahkan baik bagi aparatur pemerintah dan jajarannya. <sup>23</sup>mbentukan Satuan Tugas Penanggulangan Covid 19 yang diketuai oleh Kepala BPBN Doni Munardo, dan didaerah adanya tugas penan <sup>41</sup>man covid 19 dengan dibentuknya satuan <sup>42</sup> satuan tugas penanganan covid 19 untuk Provinsi, Kabupaten/Kota. Bagi pemerintah kesehatan masyarakat adalah hukum tertinggi yang harus diutamakan, sehingga seluruh daya yang dimiliki pemerintah diupayakan difokuskan untuk menanggulangi penanganan covid 19. Seiring dengan waktu, dimana sudah hampir 10 bulan berjalan penyebaran dan penularan covid 19 belum juga melandai, bahkan angka terkon irmasi positif setiap harinya semakin bertambah

dan sudah mencapai angka 1,3 juta (juga lebih) yang terkon irmasi positif covid 19 saat ini, sedangkan yang meninggal setiap harinya semakin bertambah, hingga awal Februari ini jumlah warga masyarakat yang meninggal sudah mencapai angka diatas 30.000 jiwa lebih, sedangkan masyarakat yang terkon irmasi sembuh dari covid 19 sudah mencapai diatas 1 juta lebih. Untuk mengatasi dan <sup>22</sup>ncegah penularan semakin massif, masyarakat diminta untuk tetap menjaga protokol kesehatan, dengan memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan di air yang mengalir dengan sabun. Untuk semua itu dilakukan pengambilan kebijakan oleh pemerintah dan jajaran kementerian dan lembaga untuk melakukan penambahan jumlah jumlah rumah sakit, dan tempat-tempat <sup>55</sup>ng dapat dijadikan lokasi isolasi pasien yang terjangkit virus corona covid 19, baik yang hergejala berat, sedang, ringan <sup>42</sup>a orang tanpa gejala, tentunya semua ini memerlukan dana yang tidak sedikit, dan sangat membutuhkan <sup>5</sup>an dana yang cukup besar. Diterbitkannya Perpu 1 Tahun 2020, tentang Kebijakan Keuangan Negara dan dijadikan Undang-Undang 2 tahun 2020, bersama DPR-RI dan merupakan upaya untuk melindungi masyarakat dari penularan covid 19. Covid 19 telah memberikan pukulan yang sangat dasyat bagi masyarakat, khususnya kepada kehidupan sosial ekonomi, dan telah banyak memakan korban, bahkan telah merenggut nyawa jutaan manusia di dunia.

Sehingga pemerintah untuk menjaga dan melindungi masyarakat dari tertularnya covid 19, pemerintah telah melakukan beberapa kebijakan dengan melakukan karantina wilayah, yang dikenal Pembatasan Sosial Berskala Besar hampir diseluruh wilayah NKRI, bagi daerah yang ingin melakukan PSBB terlebih daula harus mengajukan kepada Kementerian Kesehatan, untuk dikaji terkait besar penularan covid 19, serta dikaji kondisi masyarakatnya. PSBB jilid

1 dan PSBB jilid 2 dan PSBB transisi, sudah hampir 10 bulan lebih Indonesia dihadapi dengan permasalahan musibah kesehatan covid 19 ini, hingga saat ini ditahun 2021, musibah ini belum juga mereda, bahkan tingkat penularannya semakin massif, dimana angka terkon irmasi positif warga masyarakat sampai bulan Februari sudah mencapai angka diatas 1 juta lebih warga yang terkon irmasi positif, dan warga masyarakat yang meninggal akibat covid 19 sudah mencapai 30.000 lebih, adapun warga masyarakat yang sembuh dari covid 19, mencapai 900.000 lebih. Jawa dan Bali merupakan wilayah yang menyumbang angka positif sebanyak hampir 70%, dari jumlah angka terkon irmasi positif secara nasional. PPKM sudah berjalan hampir 2 minggu, namun hasilnya tidak maksimal, sehingga atas hasil evaluasi rapat terbatas bapak Presiden dengan jajaran kepala Daerah diwilayah Jawa dan Bali, beliau menjelaskan bahwa dalam implementasinya dilapangan PPKM belum berjalan sebagaimana yang diharapkan, hal ini dibuktikan angka terkon irmasi positif semakin bertambah, dan angka penularan setiap harinya dalam 3 minggu diawal tahun 2021, telah melonjak dan merupakan rekor penambahan tertinggi bila dibandingkan angka penambahan ditahun 2020, dimana rata-rata ditahun 2020, hanya berkisar 6000 per hari angka terkon irmasi positif, tetapi ditahun 2021 awal angka terkon irmasi positif naik menjadi diatas 12.000 perhari, bahkan pernah menyentuh angka 14800 angka terkon irmasi positif, termasuk orang yang terkena virus corona covid 19 yang meninggal bertambah diatas 30 orang yang meninggal, sempat menyentuh angka diatas 100.000 orang meninggal. Dengan kondisi ini sudah barang tentu pemerintah dan pemerintah daerah harus melakukan strategi untuk menambah lokasi-lokasi pemukiman bagi orang yang terkon irmasi positif yang meninggal dunia, dan menambah ruangruang isolasi baik isolasi

dirumah-rumah sakit darurat, wisma atlet kemayoran, dan pademangan dan hotel-hotel serta puskesmas-puskesmas yang dapat dijadikan lokasi isolasi dan penyembuhan bagi warga masyarakat yang terkon irmasi positif, khususnya diwilayah Jawa dan Bali. Ditahun anggaran 2020, dengan adanya Refocusing anggaran dan realisasi anggaran APBN dan APBD, berdasarkan Perpres No. 72 Tahun 2020, besaran defisit mencakup pembiayaan pemulihan ekonomi nasional mencakup: 1) Program kesehatan Rp87,56 triliun, realisasi Rp21,92 triliun atau 25%; 2) Perlindungan sosial Rp203,91 triliun, realisasi Rp157,03 triliun atau 77%; 3) Insentif usaha Rp120,61 triliun, realisasi Rp28,087 triliun atau 23,3%; 4) Bantuan UMKM Rp123,47 triliun, realisasi Rp81,85 triliun atau 66,3%; 5) Pembiayaan korporasi Rp53,6 triliun, realisasinya belum saat ini; 6) Sektoral serta pemda, bantuan oleh pemerintah pusat untuk sektor dan pemda Rp106,05 triliun, realisasi sebesar Rp26,61 triliun atau 25,1%. " Secara jelas tergambar, dimana porsi terbesar adalah untuk membiayai perlindungan sosial. Dan merupakan respons dampak akibat perlambatan ekonomi dan terjadinya PSBB jilid 1, PSBB jilid 2 dan PSBB transisi, yang telah memukul secara signifikan kemampuan ekonomi masyarakat kita, diikuti dengan pemberian stimulus bagi UMKM dan insentif usaha serta anggaran untuk bantuan sektoral serta pemerintah daerah. ( Sumber: Kementerian Keuangan RI).

Atas dasar permasalahan tersebut diatas, penulis tertarik untuk melakukan kajian secara deskriptif, kualitatif terkait dengan Keselamatan dan Perlindungan masyarakat dari penularan covid 19 di Indonesia.

Tujuannya adalah untuk mengetahui dan mendapatkan dukungan data, yang akan dijadikan analisis kajian deskriptif.

## KAJIAN PUSTAKA

### Kebijakan

Apa yang dilakukan pemerintah semata-mata untuk melindungi masyarakat dari tertular covid 19, sesuai dengan otoritas yang dimiliki pemerintah, karena kesehatan masyarakat merupakan yang paling utama dalam penerapan kebijakan yang dilakukan pemerintah. Dan pemerintah memiliki otoritas untuk mengatur dan melindungi masyarakatnya. Kebijakan pemerintah dapat dikonotasikan sebagai kebijakan negara. Dan hal ini guna untuk mencapai pencegahan yang terjadi adanya covid 19, semakin merebak kemana-mana. Dan dilakukan dalam rangka untuk kepentingan umum.

**Kebijakan** merupakan suatu rangkaian dari sebuah konsep dan azas yang dapat dijadikan pedoman pelaksanaan pekerjaan dan cara bertindak guna mencapai tujuan (1). Dimana penerapannya dapat dilakukan dalam sebuah organisasi dan kelompok atau pada Pemerintahan. Sedangkan kebijakan sangat berbeda dengan peraturan dan hukum. Karena hukum dapat memaksa atau melarang suatu perilaku. Sedangkan kebijakan hanya sebagai rujukan atau pedoman tindakan untuk memperoleh hasil yang ditetapkan. ( Sumber: **Wikipedia bahasa**

**Indonesia, ensiklopedia bebas Keselamatan**).

**Keselamatan** dapat diartikan kondisi yang aman secara fisik, sosial, spiritual, inisial, politis, emosional dan terhindar dari ancaman. Untuk mencapai hal tersebut diperlukan perlindungan terhadap suatu kejadian yang merugikan kesehatan dan ekonomi.

#### ► Jenis Keselamatan

Adanya perbedaan antara produk sesuai standar yang dirasakan aman, dimana umumnya ada tiga jenis yang meliputi :

- *Jenis keselamatan normative;*

- *Jenis Keselamatan substantive; dan*
- *Jenis Keselamatan yang dirasakan*

#### ► Sistem keselamatan

Sistem keselamatan merupakan gabungan dari 4 berbagai indicator-indikator yang meliputi aspek kualitas, kehandalan, ketersediaan, kestabilan, dan keselamatan yang digabung menjadi suatu system guna dapat bermanfaat bagi melindungi dan memberikan perlindungan bagi masyarakat lainnya. Dalam suatu pabrik adanya safety, health, and environment. Yang dirancang untuk system keselamatan pabrik.

#### ► Pengukuran keselamatan

Beberapa pengukuran keselamatan meliputi:

- **Terdeteksinya** pintu keluar darurat yang tertutupi oleh barang yang disimpan. Ini merupakan pengamatan visual.
- **Pemeriksaan visual terhadap cacat** seperti retak, sambungan yang kend
- **Analisis X-ray** untuk memeriksa objek yang tertutup seperti hasil pengelasan, tembok semen, atau kulit bagian luar pesawat.
- **Uji tekan** dilakukan dengan memberi tekanan pada orang atau produk, untuk menentukan "breaking point".
  - Adanya aktivitas kerja terkontrol dan merupakan standar dari protokol.
- Adanya pelatihan bagi tenaga kerja dan vendor, serta pengguna produk.
- Adanya petunjuk secara manual, yang menjelaskan penggunaan suatu produk atau pelaksanaan suatu aktifitas.
- Adanya **Viden instruksional**, digunakan untuk mendemonstrasikan cara penggunaan produk yang benar.
- Dilakukan **Evaluasi aktivitas** oleh ahlinya, guna dapat meminimalkan adanya kecelakaan dan dapat meningkatkan produktivitas..

- Tersedianya Peraturan Pemerintah guna dapat menetapkan standar minimal.
- Adanya Pernyataan etis oleh organisasi atau perusahaan, agar karyawan dapat mengerti apa yang diinginkan oleh mereka.
- Adanya cek kesehatan secara berkala, guna dapat menentukan seseorang dalam keadaan sehat.
- Dilakukan evaluasi secara periodik, terhadap semua pegawai disetiap departemen dan sebagainya.
- Dilakukan Survei lingkungan untuk dapat mengamati tingkat pencemaran lingkungan.

35

### Pengertian, Tugas, Pokok dan Fungsi LINMAS

#### ► LINMAS (Perlindungan Masyarakat)

Masyarakat yang dibekali dengan ilmu pengetahuan dan ketrampilan, guna dapat membantu penanganan bencana yang terjadi dan dikandung maksud adalah untuk dapat mengurangi dan memperkecil jatuhnya korban.

Linmas merupakan singkatan dari perlindungan masyarakat, dimana telah mengalami distorsi dan terjebak dalam pandangan umum yang hanya mengkaitkan dengan sebuah fungsi dalam masyarakat dan lebih dikenal dengan sebutan HANSIP, pertahanan sipil. Sehingga hal ini perlu dikaji ulang kembali istilah dan pengertian dari Perlindungan Masyarakat dan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) itu sendiri.

Berdasarkan Peratran Menteri Dalam Negeri nomor 10 Tahun 2009, tentang Penugasan Satuan Perlindungan Masyarakat Dalam Penanganan Ketentraman, Ketertiban, dan Keamanan Penyelenggaraan Pemilu dalam Pasal 1 butir 1 dijelaskan bahwa

Satuan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satuan Linmas adalah warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan.

Satuan Perlindungan Berdasarkan Permendagri Nomor 10 Tahun 2009 memiliki beberapa unsur kata, yaitu:

1. Adalah warga masyarakat yang dibekali dengan ilmu pengetahuan dan kerampilan.
2. Mempunyai tugas untuk penanganan bencana guna mengurangi resiko bencana.
3. Dan turut serta memelihara dan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
4. Turut sertadalam kegiatan kemasyarakatan.
5. Kumpulan orang-orang dalam suatu wilayah dan mempunyai idolog yang sama serta tempat tinggal didaerah/Pemerintahan yang sama dan memiliki atau mempunyai hak dan kewajiban yang sama yaitu untuk membela negaranya jika diperlukan maka kumpulan orang-orang tersebut adalah rakyat dan sudah memenuhi syarat-syarat sebagai rakyat yang diambil dari kata Rahayat artinya pengabdian, pengikut dan pendukung.

Warga masyarakat atau penduduk atau rakyat adalah Rakyat (Inggris: Peoples) adalah bagian dari suatu negara atau elemen penting dari suatu pemerintahan.

#### ► Tugas Linmas

1. Satuan perlindungan masyarakat, dan mengumpulkan data dan informasi serta menganalisa data yang diperoleh. Dan dinamakan penganaman swakarsa.
2. Menyiapkan dan menyusun prosedur tetap, petunjuk teknis dan pelaksanaan

- satuan perlindungan masyarakat serta pengamanan swakarsa.
3. Melakukan identifikasi serta menyusun usulan sarana dan prasarana satuan perlindungan masyarakat dan pengamanan swakarsa.
  4. Melakukan penyusunan kebutuhan satuan perlindungan masyarakat yang bertugas dalam pelaksanaan pemilu dan pilkada.
  5. Melakukan pengamanan dan perlindungan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu.
  6. Membantu masyarakat dalam penugasan pencarian dan penyelamatan korban bencana.
  7. Melakukan koordinasi dan bekerjasama dengan instansi-instansi terkait dalam pengembangan perlindungan masyarakat.
  8. Membuat dan membuka pos-pos pemantauan bencana sebagai media informasi satuan perlindungan masyarakat.
  9. Menjalankan dan melaksanakan tugas-tugas lainnya dari pimpinan.

Dili tugas-tugas tersebut di atas, adanya tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan, yang harus dilaksanakan oleh petugas-petugas LINMAS.

### Penularan Covid 19.

Gangguan pernapasan yang diakibatkan infeksi virus corona merupakan sebuah wabah penyakit yang melanda dunia diakhir tahun 2019. Pertama kali terjadi di Wuhan China, dimana muncul pertama kali. Gejalanya adalah adanya gangguan pernapasan, yang ditimbulkan dengan batuk dan pilek bagi masyarakat yang terkena atau tertular virus corona, serta mengalami

demam tinggi diatas 38 derajat celcius. Penyakit ini mewabah sampai diseluruh dunia, dengan cepat penularannya diberbagai negara didunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia virus corona pertama kali terjadi diawal tahun 2020, dimana ada masyarakat depok yang tertular, yang diakibatkan yang bersangkutan baru saja pulang dari perjalanan luar negeri.

### ► Penyebab Virus Corona (COVID-19)

Penyebab virus corona adalah, terjadi kontak secara langsung dengan orang yang terinfeksi covid 19, dapat juga tertular dari kontak langsung dengan binatang piaraan yang sedang sakit, dan kondisi Badan tidak atau kurang vit. Iurangnya istirahat yang cukup, dan masukan asupan yang tidak higienis, Virus corona dapat menularkan baik melalui percikan air liur, maupun benda-benda disekitar kita, atau bersentuhan tangan secara langsung, kepada orang yang sedang sakit dan secara kebetulan yang bersangkutan sedang tertular virus corona. Virus ini merupakan Virus baru dimana sebelumnya Penyebab Corona virus merupakan virus single stranded RNA yang berasal dari kelompok Coronaviridae. Virus corona dari Wuhan ini merupakan virus baru yang belum pernah teridentifikasi pada manusia sebelumnya. Manusia dapat tertular virus apabila terdapat riwayat kontak dengan hewan, misalnya pada peternak atau pedagang di pasar hewan. Kasus di Wuhan, China menunjukkan bahwa corona virus



dapat ditularkan dari manusia ke manusia. Virus bisa ditularkan lewat droplet, yaitu partikel air yang berukuran sangat kecil dan biasanya keluar saat batuk atau bersin.

### Gejala Virus Corona (COVID-19)

Masyarakat yang terkena Gejala Coronavirus sangat bervariasi, diantaranya mengalami gangguan :

Mengalami demam tinggi, disertai dengan pilek, dimana hidung berair dan bersin, bersin tenggorokan nyeri napas teras sesak.

Jika tidak dilakukan penanganan secara tepat dan tepat akan berakibat fatal bagi yang terkena dan terkonfirmasi virus corona, karena sampai saat ini belum ada obat penangkalnya disuluruh dunia.

#### ▶ **Diagnosis Virus Corona (COVID-19)**

Covid 19, diketahui dengan gejala dan pemeriksaan fisik, setelah dokter melakukan sejumlah pemeriksaan untuk membantu mendapatkan diagnosis yang tepat terhadap pasien yang terkena covid 19.

Dengan melakukan pemeriksaan penunjang lainnya seperti pemeriksaan darah lengkap, pemeriksaan pembekuan darah, fungsi ginjal dan hati serta pemeriksaan virology.

#### ▶ **Komplikasi Virus Corona (COVID-19)**

Tanda-tandanya pasien mengalami dan terkena virus corona, dimana pasien terkena demam tinggi, gangguan pernapasan, dan sesak napas.

#### ▶ **Pengobatan Virus Corona (COVID-19)**

Sampal saat ini belum adanya obat yang dapat menangkal covid 19, selain masyarakat harus disiplin diri, dengan melakukan cuci tangan di air yang mengalir seringkali, dengan sabun, menggunakan masker yang benar, menjaga jarak sesamanya, kurangi kerumunan, dan jika tidak sangat penting untuk tidak keluar rumah, dalam arti dan anjuran pemerintah adalah, bekerja dari rumah, belajar dari rumah, serta ibadah di rumah. Baru ini yang dapat dilakukan, dan memakan asupan yang higienis serta kurangi aktifitas keluar rumah, jika tidak sangat penting sekali. Olah raga yang cukup, berjemur di matahari pagi pada pukul 9 pagi hingga pukul 10 pagi, istirahat yang cukup. Berpikir dengan enjoy, hidup dalam apa adanya.

#### ▶ **Pencegahan Virus Corona (COVID-19)**

Pencegahan yang terbaik seperti apa yang sudah tertulis sebelumnya, juga dapat ditambahkan, diantaranya :

1. Jangan menyentuh hidung, mata atau mulut terutama jika tangan masih kotor.
2. Jaga jarak dan hindari kontak dengan pihak lain apalagi orang sakit.
3. Bila sakit, tetap tinggal di rumah.
4. Bila bersin tutup mulut, dengan tisu atau menekuk siku saat jika batuk atau bersin.
5. Jangan kontak dengan hewan ternak secara langsung.
6. Jangan makan makanan daging yang belum matang atau setengah matang.

Makanlah makanan yang bergizi, dan seimbang dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi, istirahat cukup, minum air putih yang cukup dapat membantu menjaga kondisi kebugaran tubuh dan terhindar dari infeksi virus corona.

Pemerintah sangat konsisten didalam melindungi masyarakat, terdampak covid 19, dengan memberikan bantuan-bantuan secara gratis, bagi pasien, yang tertular, semua ditanggung oleh negara, dan siapkan rumah sakit-rumah sakit rujukan yang dapat digunakan bagi masyarakat yang tertular covid 19. (Sumber: Gugus Tugas Penanggulangan Covid 19).

### METODELOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, dengan data-data untuk dianalisis merupakan data yang bersumber dari media cetak, media elektronik dan literature-literatur, dari penjelasan beberapa pejabat Kementerian Keuangan, Menko Perekonomian, dan Pejabat Gugus Tugas Penanggulangan Covid 19. Yang diperoleh dari media cetak, harian kompas, lithang kompas.

\* Penelitian kualitatif adalah penelitian dilakukan dengan untuk memahami fenomena-fenomena yang terjadi dilapangan, dengan melihat prilaka-prilaku, serta persepsi, motivasi dan tindakan tindakan yang dilakukan secara holistik dengan menggunakan analisis diskriptif dengan konstek khusus yang alamiah. (Sumber : Moleong,2011:6).

"Penelitian deskriptif adalah sebagaimana yang dikemukakan oleh Sugiyono (2011), penelitian deskriptif adalah sebuah penelitian yang bertujuan untuk dapat memberikan gambaran dan

menjabarkan atau menjelaskan akan suatu fenomena-fenomena yang terjadi dilapangan dengan menggunakan prosedur ilmiah untuk menjawab masalah secara aktual.

Data-data yang didapat dalam kajian ini adalah sumber data literature dan media cetak dan media elektronik, serta dirilis dari penjelasan-penjelasan dari kementerian keuangan, menko perekonomian dan data satuan tugas penanganan covid 19.

### HASIL DAN BAHASAN

Pemerintah menegaskan bahwa dalam penanganan pandemi covid 19 yang utama dan menjadi prioritas utama adalah kesehatan masyarakat, dan keselamatan masyarakat. Jika ini dapat dilaksanakan dengan baik, maka pemulihan ekonomi akan dapat dicapai, dimana saat ini penanganan ekonomi berjalan heriringan dengan adanya covid 19 yang belum usai. (sumber dirilis dari penjelasan oleh Presiden Republik Indonesia pada sidang Kabinet Penanganan Kesehatan dan Pemulihan Ekonomi dalam rangka penguatan reformasi pada tahun 2021 di Istana Negara).

Presiden juga memerintahkan jajarannya agar serius dalam penanganan covid 19, Indonesia memfokuskan penanganan covid 19, kepada kesehatan masyarakat dan perlindungan masyarakat, dengan melakukan pembatasan sosial masyarakat secara luas, hal ini dilakukan untuk dapat mencegah penularan secara massif.

Pemulihan ekonomi akan berlanjut ditahun anggaran 2021, hal ini dikarenakan dampak pandemik covid 19 diprediksi akan masih berlanjut ditahun anggaran 2021. ( sumber : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartato dirilis pada tanggal 5 Agustus 2020).

### Perindungan sosial dan pemulihan ekonomi

Anggaran yang disediakan dalam rangka pemulihan ekonomi nasional adalah sebesar Rp. 695, 2 triliun ditahun 2020, dimana peruntukannya adalah bagi kesehatan dan perlindungan masyarakat dan pemulihan ekonomi secara nasional. Dan memberikan bantuan kepada masyarakat, dan tenaga-tenaga medis dan memastikan bahwa perlindungan masyarakat yang rentan serta perlindungan kepada pelaku-pelaku dunia usaha, khususnya UMKM. Yang terdampak covid 19.

Untuk melindungi masyarakat pada bidang ekonomi, dan untuk melakukan pemulihan ekonomi, dirancang cara-cara untuk melindungi masyarakat miskin dan mendukung dunia usaha agar tidak semakin terpuruk dampak covid 19.

Perlindungan kepada dunia usaha diwujudkan dengan memberikan bantuan kepada usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Sehingga jika ditinjau dari kaca mata ekonomi apa yang dilakukan pemerintah merupakan sebuah tindakan untuk memberikan perlindungan sosial

dimana dilakukan sekaligus dalam rangka memulihkan ekonomi. Adapun memberikan perlindungan kepada masyarakat yang rentan dan miskin dilakukan dengan adanya jaringan pengamanan sosial. Dimasa covid 19 ini kedua sisi tersebut sangat terpuak yang diakibatkan adanya pembatasan sosial, ini berdampak kepada terhentinya kegiatan dunia usaha dan berdampak kepada menurunnya kinerja ekonomi masyarakat secara keseluruhan., akibatnya menurunnya pertumbuhan ekonomi secara nasional. Dalam pemulihan ekonomi pemerintah melakukan kebijakan dengan menyasar sekaligus sisi produksi dan sisi konsumsi. Dan merupakan bantuan alternative yang dapat dilakukan pemerintah, guna dapat memberikan bantuan akan kebutuhan masyarakat dalam kesehariannya. Peningkatan konsumsi ini merupakan upaya yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dan peningkatan konsumsi merupakan sebuah upaya yang dilakukan pemerintah dalam rangka pemulihan ekonomi.

### Program perlindungan sosial

Pemerintah mengalokasikan anggaran untuk program perlindungan sosial, dan disediakan anggaran sebesar Rp. 695, 2 T. Diperuntukan bagi kesehatan masyarakat sebesar Rp. 607,65 T dan untuk bidang PEN sebesar Rp. 87,55 T.

### Sebelas bantuan kepada masyarakat terdampak dimasa masih adanya Covid 19.

Sebelas bantuan pemerintah diperuntukan :

1. Program keluarga harapan meliputi : bantuan regulat yang sudah ada sebelumnya telah berjalan dari 9,2 jt penerima manfaat PKH menjadi 10 juta keluarga. Alokasi anggaran sebesar Rp.37,4 T.

2. Pemberian bantuan kepada ibu hamil, sebesar Rp. 3,75 juta/orang dan bantuan kepada anak-anak sekolah TK, SD dan SMP serta SLA, dimana rata-rata mereka menerima sebesar Rp. 2.375.000/orang siswa. Dan bantuan kepada kaum dipabel diberi bantuan sebesar Rp.3.00.000/orang serta kepada lansia yang berumur diatas 70 tahun keatas diberi bantuan sebesar Rp. 3.000.000. Bantuan skema PKH kepada maksimal 4 orang dalam 1 keluarga, dimana bantuan tertinggi sebesar Rp.10.000.000. pertahun dan terendah sebesar Rp. 900.000 pertahun.

Program kedua adalah pemberian sembako melalui kartu sembako dengan jumlah penerima kartu sembako berjumlah 20 juta orang dengan nilai Rp.200.000 per PKM diberikan selama 9 bulan hingga desember 2020.

Program ketiga pemberian bantuan kepada 1,3 juta KPM di Bodetabek yang tidak mendapatkan PKM dan anggaran yang disediakan adalah sebesar Rp. 6,8 T. Dan nilai manfaat yang dapat diberikan sebesar

Rp. 600.000 per KPM dari April sampai dengan Juni 2020. Dan diberikan dalam bentuk sembako perpaket.

Keempat, pemerintah juga memberikan bansos tunai kepada 9 juta KPM yang tidak menerima bantuan PKH dan kartu sembako. Sedangkan nilai manfaat yang diberikan adalah sebesar Rp. 600.000 per KPM sejak bulan April sampai dengan Juni 2020 diberikan dalam bentuk uang tunai.

Kelima, pemberian pembebas biaya listrik bagi masyarakat pelanggan 450 VA dan sebanyak 24 jt pelanggan, dan diskon 50 % bagi pelanggan 900 VA dengan jumlah 7,2 jt pelanggan.

Keenam, bantuan untuk kartu prakerja dinaikan anggarannya dari semula 10 T menjadi 20 T, dan diberikan kepada 5,6 juta orang terkena PHK, bantuan kepada UMKM serta pekerja informal terdampak covid 19.

#### Ketujuh

Bantuan Layanan Tunai Dana Desa ditanggarkan sebesar Rp31,8 triliun.

#### Kedelapan

Bantuan kepada 9 juta KPM yang belum menerima manfaat PKH dan kartu sembako. Nilai manfaatnya sebesar Rp. 600.000 /bulan..

#### Kesembilan,

Disiapkan perumahan sebanyak 175 ribu unit rumah bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah. Dengan pemberian insentif dan disediakan anggaran sebesar Rp. 1,3 T.

### Kesepuluh

Bantuan diberikan kepada UMKM yang mempunyai penghasilan bruto tak lebih dari Rp. 200 juta pertahun. Dan memberikan insentif biaya PPh Pasal 21.

### Kesebelas,

Bantuan diberikan kepada masyarakat yang memiliki penghasilan dibawah 5 juta perbulan, dan mereka merupakan peserta Jamsostek ketenagakerjaan. Bantuan diperuntukan bagi 15, 7 juta peserta aktif Jamsostek ketenagakerjaan.

Implementasinya dilakukan bekerjasama dengan bank-bank pemerintah dan swasta sebanyak 127 bank yang ditunjuk oleh pemerintah untuk dapat menyalurkan bantuan dimaksud. (sumber: litbang kompas)

### SIMPULAN

Bahwa untuk penanganan covid 19, Pemerintah dengan berbagai kebijakan telah ditempuh dan diimplementasikan secara nyata, yaitu berupa berbagai bantuan kepada masyarakat yang terdampak covid 19.

Pemerintah juga sangat serius sekali, dimana ditahun 2021, bantuan sosial akibat adanya covid 19 tetap dilanjutkan, namun terdapat evaluasi penyempurnaan disana sini, misalnya pemberian bantuan sosial yang dilakukan oleh Menteri Sosial, tidak dilakukan secara pemberian secara langsung, berdasarkan hasil up-dating data yang telah diperbaharui oleh jajaran Kementerian Sosial berdasarkan data yang diterima dari Badan

Statistik Nasional dan Komisi Pemeliharaan Umum serta dari Kementerian Dalam Negeri data dilakukan sinkronisasi secara nasional, setelah didapat data yang akurat kebenarannya maka mekanisme bantuan dilakukan secara on-line kemasing-masing masyarakat, dan secara langsung ada yang didatangi kerumahnya masing-masing oleh jajaran Kementerian Sosial bersama-sama dengan jajaran aparatur desa di Indonesia.

Dan juga masih memberikan bantuan kepada kelompok masyarakat menengah dengan pembebasan PPh pasal 21, kartu prakerja, BLT dana desa, serta Bansos tunai non jабodetabel, serta pembebasan biaya listrik dan subsidi gaji. Dan insentif perumahan bagi masyarakat kecil.

Dalam implementasinya pemerintah melibatkan 127 bank yang ditunjuk untuk melakukan penyaluran bantuan pemerintah ini, kepada masyarakat. Secara internal mempedomani kepada Permenaker 14 tahun 2020. Dan ketiga mengecek kesamaan identitas nomor rekening dan kepesertaan pekerja di BP Jamsostek. (Sumber: LITBANG KOMPAS).

Semua yang dilakukan pemerintah adalah dalam rangka untuk melindungi dan menyelamatkan masyarakat dari berbagai permasalahan yang diakibatkan dampak pandemic covid 19, karena pemerintah dan pemerintah daerah bertekad bahwa Keselamatan Masyarakat adalah hukum tertinggi di Negeri ini (NKRI), di tahun anggaran 2021, pemerintah masih tetap

mempertahankan postur APBN dan APBD, prioritas utamanya adalah untuk mengatasi kesehatan masyarakat dari tertularnya covid 19 dan pemulihan ekonomi nasional.

## SARAN

Atas dasar stimulus-stimulus bantuan pemerintah untuk masyarakat, yang terdampak covid 19, ditahun 2020, dan akan diteruskan ditahun anggaran 2021, kiranya mari ikut berpartisipasi dalam program kesehatan masyarakat, khususnya diri kita dan keluarga kita dulu untuk disiplin menjaga protocol kesehatan, dan ikuti anjuran pemerintah untuk tetap bekerja dari rumah, ibadah dari rumah dan sekolah dari rumah (*Work From Home*) dan untuk mengurangi kegiatan diluar rumah yang sifatnya tidak terlalu penting dan mendesak, jika penting dan mendesak, tetap menjaga protocol kesehatan tetap memakai masker, mencuci tangan di air mengalir, menjaga jarak dan hindari krumunan dengan masyarakat lain, guna menghindari diri dari tertularnya virus corona covid 19. Dengan kita tetap menjaga protocol kesehatan selain menjaga diri kita, juga menjaga dan melindungi orang lain, atau kawan kita dan sahabat kita. Negara dan Pemerintah telah hadir dalam mengatasi perlindungan kepada masyarakatnya, tinggal sbagaimana masyarakat merespon kehadiran negara dan pemerintah dalam penanggulangan bencana kesehatan ini, tentunya ini bukan harus diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah, tetapi kita

sebagai warga negara yang baik, juga harus turut berpartisipasi dengan tetap menjaga protocol kesehatan secara ketat dan disiplin agar kita terhindar dari penularan covid 19.

Dimasa covid 19 belum usai, perlu adanya kerjasama yang sinergis antara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan pihak-pihak terkait, khususnya TNI dan Polri serta peran aktif para tokoh dan ulama-ulama untuk dapat membantu pemerintah memberikan edukasi kepada masyarakat, agar masyarakat dapat patuh menjaga protocol kesehatan, dan patuh akan kebijakan yang dilakukan pemerintah. Karena pada dasarnya apa yang dilakukan pemerintah merupakan kewajiban pemerintah untuk dapat melindungi masyarakat, dari tertular covid 19. Patuhi untuk memvalesin diri pribadi, keluarga dan kelompok, guna terjadinya kekebalan komunal yang diharapkan pemerintah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Moleong, Lexy. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Subarsono, AG. 2006. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Tangkilisan, Hessel Nogi S. 2003. *Teori dan Konsep Kebijakan Publik dalam Kebijakan Publik yang Membantu, konsep, strategi dan kasus*. Yogyakarta: Lukanan Offset dan YPAPI Penelitian dan Pengembangan Kompas (Litbang Kompas) Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2020, tentang Kebijakan



Kuangan Negara dan Sistem Stabilisasi  
Keuangan Negara.

Undang-Undang nomor 2 tahun 2020, tentang  
Keuangan Negara dan Sistem Stabilisasi  
Keuangan Negara.

# jurnal Bu Rosmery p.m.koreksi VI

## ORIGINALITY REPORT

29%

SIMILARITY INDEX

27%

INTERNET SOURCES

8%

PUBLICATIONS

8%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1	<a href="http://www.klikdokter.com">www.klikdokter.com</a> Internet Source	3%
2	<a href="http://www.researchgate.net">www.researchgate.net</a> Internet Source	3%
3	<a href="http://kompaspedia.kompas.id">kompaspedia.kompas.id</a> Internet Source	3%
4	<a href="http://id.wikipedia.org">id.wikipedia.org</a> Internet Source	2%
5	<a href="http://www.mkri.id">www.mkri.id</a> Internet Source	2%
6	<a href="http://kelurahanngringo.blogspot.com">kelurahanngringo.blogspot.com</a> Internet Source	2%
7	<a href="http://www.rancanumpang.com">www.rancanumpang.com</a> Internet Source	2%
8	<a href="http://123dok.com">123dok.com</a> Internet Source	1%
9	Rizky A. Prasojo, Luluk Fauziah. "PERAN PEMERINTAH-MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA SEDATIGEDE	1%



KECAMATAN SEDATI KABUPATEN SIDOARJO",  
JKMP (Jurnal Kebijakan dan Manajemen  
Publik), 2015

Publication

---

10	<a href="http://satpolpp.jatimprov.go.id">satpolpp.jatimprov.go.id</a> Internet Source	1 %
11	Submitted to Universitas Komputer Indonesia Student Paper	1 %
12	<a href="http://journal.undiknas.ac.id">journal.undiknas.ac.id</a> Internet Source	<1 %
13	<a href="http://sat-linmaskotajogja.blogspot.com">sat-linmaskotajogja.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %
14	<a href="http://kumparan.com">kumparan.com</a> Internet Source	<1 %
15	Noni Noerkaisar. "Efektivitas Penyaluran Bantuan Sosial Pemerintah untuk Mengatasi Dampak Covid-19 di Indonesia", Jurnal Manajemen Perbendaharaan, 2021 Publication	<1 %
16	<a href="http://banksoal2.blogspot.com">banksoal2.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %
17	<a href="http://www.coursehero.com">www.coursehero.com</a> Internet Source	<1 %
18	Submitted to Universitas Negeri Jakarta Student Paper	<1 %

---

19	e-journal.metrouniv.ac.id Internet Source	<1 %
20	Submitted to Unika Soegijapranata Student Paper	<1 %
21	journal.iainkudus.ac.id Internet Source	<1 %
22	nasional.kontan.co.id Internet Source	<1 %
23	www.portalkaltara.com Internet Source	<1 %
24	aminoto5758.blogspot.com Internet Source	<1 %
25	today.line.me Internet Source	<1 %
26	Dian Herdiana. "PENGAWASAN KOLABORATIF DALAM PELAKSANAAN KEBIJAKAN BANTUAN SOSIAL TERDAMPAK COVID-19", JDP (JURNAL DINAMIKA PEMERINTAHAN), 2020 Publication	<1 %
27	dinsos.kalselprov.go.id Internet Source	<1 %
28	jurnal.untan.ac.id Internet Source	<1 %
29	kantorpemuda.com Internet Source	<1 %

---

30	<a href="http://www.jurnal-eresha.ac.id">www.jurnal-eresha.ac.id</a> Internet Source	<1 %
31	<a href="http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id">digilib.iain-palangkaraya.ac.id</a> Internet Source	<1 %
32	<a href="http://kominfo.go.id">kominfo.go.id</a> Internet Source	<1 %
33	<a href="http://web2.gov.mb.ca">web2.gov.mb.ca</a> Internet Source	<1 %
34	<a href="http://www.bangkalankab.go.id">www.bangkalankab.go.id</a> Internet Source	<1 %
35	<a href="http://www.batukandik.desa.id">www.batukandik.desa.id</a> Internet Source	<1 %
36	<a href="http://www.bbc.com">www.bbc.com</a> Internet Source	<1 %
37	<a href="http://www.jstage.jst.go.jp">www.jstage.jst.go.jp</a> Internet Source	<1 %
38	<a href="http://www.kompasiana.com">www.kompasiana.com</a> Internet Source	<1 %
39	<a href="http://zombiedoc.com">zombiedoc.com</a> Internet Source	<1 %
40	<a href="http://core.ac.uk">core.ac.uk</a> Internet Source	<1 %
41	<a href="http://ditjenbinaadwil.kemendagri.go.id">ditjenbinaadwil.kemendagri.go.id</a> Internet Source	<1 %

---

42	<a href="http://josindonesia.blogspot.com">josindonesia.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %
43	<a href="http://katadata.co.id">katadata.co.id</a> Internet Source	<1 %
44	<a href="http://kominfo.jatimprov.go.id">kominfo.jatimprov.go.id</a> Internet Source	<1 %
45	<a href="http://lib.um.ac.id">lib.um.ac.id</a> Internet Source	<1 %
46	<a href="http://pt.scribd.com">pt.scribd.com</a> Internet Source	<1 %
47	<a href="http://revistas.ua.pt">revistas.ua.pt</a> Internet Source	<1 %
48	<a href="http://riaupos.jawapos.com">riaupos.jawapos.com</a> Internet Source	<1 %
49	<a href="http://www.kemenkeu.go.id">www.kemenkeu.go.id</a> Internet Source	<1 %
50	<a href="http://www.lelinofita.com">www.lelinofita.com</a> Internet Source	<1 %
51	<a href="http://www.scribd.com">www.scribd.com</a> Internet Source	<1 %
52	Rokhmayanti Rokhmayanti, Sulistyawati Sulistyawati, Budi Aji, Siwi Pramatama Mars Wijayanti. "Information Needs Among Indonesian People Related to COVID-19",	<1 %

53

Khairul Rahman. "Implementasi Kebijakan Pembatasan Sosial Bersekala Besar dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Indonesia", Indonesian Governance Journal : Kajian Politik-Pemerintahan, 2021

Publication

<1 %

54

Tiara Verita Yastica, Sheila Amalia Salma, Dino Caesaron, Yunita Nugrahaini Safrudin, Afir Rizqi Pramadya. "Application of Theory Planned Behavior (TPB) and Health Belief Model (HBM) in COVID-19 Prevention: A Literature Review", 2020 6th International Conference on Interactive Digital Media (ICIDM), 2020

Publication

<1 %

55

[www.batamnews.co.id](http://www.batamnews.co.id)

Internet Source

<1 %

56

[yusranlapananda.wordpress.com](http://yusranlapananda.wordpress.com)

Internet Source

<1 %